

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Prakte*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Boedi Harsono, 2005, *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*, Djambatan: Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia “Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”*, Djambatan: Jakarta.
- Dr. Mohammad Saleh, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni: Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*, Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Issac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, 1982, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Pramita: Jakarta.
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan mahkamah syari’ah*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada: Jakarta.
- R. Soeroso, 2009, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju: Bandung.
- Rusmandi Murad, 2013, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni: Bandung.
- Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, BPHN: Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Kencana: Surabaya.

Waskito dan Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Prenadamedia Group: Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1975, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung: Bandung.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, PPID DPR RI.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2108 K/Pdt/2022

Putusan Nomor 68/PDT/2020/PT PDG

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bkt

D. Jurnal

A. A. Sagung Tri Buana Marwanto, 2017, "*Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara*", Volume 5, Nomor 4.

Anita Sofiana dan Akhmad Khisni. 2017, "*Akibat Hukum Pengalihan Hak Jual Beli Melalui Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Tanah Warisan Tanpa*



Persetujuan Salah Satu Ahli Waris Lainnya”, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 1.

Arie Bestary, 2014, “*Analisis Yuridis Kelemahan Kriteria Tanah Terlantar Yang Berstatus Hak Milik*”, E-Jurnal Gloria Yuris, Volume 2, Nomor 3.

Fajrurrahman Febby, 2017, “*Problematika Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.*” Jatiswara 32, Nomor 1.

Hapa & Irene Gabriela, 2024, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah oleh PTUN.*” Lex Administratum 12, Nomor 5.

Isna Dwi Fatatun, 2016, “*Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2014-2015*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sri Hartini, dkk, 2017, “*Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman*”, Universitas Negeri Yogyakarta, Volume 14, Nomor 2.

E. Internet

Pinterhukum. "Hukum Acara Perdata Menurut Para Ahli." Diakses melalui <https://pinterhukum.or.id/hukum-acara-perdata-menurut-para-ahli/> pada 22 februari 2024

